

MATRIKS TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGHUBUNG
TAHUN 2025

NO.	KOMPONEN PENILAIAN LHE		KONDISI TERKINI	RENCANA AKSI	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PIC/SUPPORT)	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	BUKTI DUKUNG	KET.
	TEMUAN/CATATAN	REKOMENDASI										
A. PERENCANAAN KINERJA												
1.	Indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART	Menyusun indikator kinerja dengan kriteria SMART	Sebagian indikator masih perlu penyempurnaan	Reviu dan penyempurnaan IKU	Persentase IKU SMART	100%	Workshop dan reviu IKU	Juni 2026	Kasubbag Perencanaan	Proses	Dokumen IKU	https://drive.google.com/file/d/1CKt2wJZQHRqz7JlAL5FoF4yApRDtCH-/view?usp=drive_link
2.	Target kinerja belum achievable, menantang dan realistis	Menyusun target yang achievable dan realistis	Target masih perlu penyesuaian	Penyempurnaan target kinerja	Persentase target sesuai kriteria	100%	Reviu target PK dan Renja	Juni 2026	Sekretaris Badan	Proses	Dokumen PK	https://drive.google.com/file/d/1dxD465qXa3teAgqLX3bkDJt234SWI6d_/view?usp=drive_link
3.	Cascading belum selaras antar level jabatan	Menyusun cascading kinerja yang selaras	Pohon kinerja belum optimal	Penyusunan cascading dan pohon kinerja	Kesesuaian cascading	100%	Penyusunan pohon kinerja	Juli 2026	Tim SAKIP	Belum selesai	Pohon Kinerja	https://drive.google.com/file/d/1L-2lh3ym0wd6xkgUjR5oYmb4JOa5ZUwC/view?usp=drive_link
4.	Unit kerja belum memahami target kinerja	Evaluasi kinerja berkala setiap unit	Monitoring belum rutin	Pelaksanaan rapat evaluasi berkala	Jumlah evaluasi	4 kali/tahun	Monitoring dan evaluasi	Triwulan 2026	Kepala Badan	Berjalan	Notulen rapat	https://drive.google.com/file/d/16R30bVmUrWabWQDemlL3g94Rtl4YRSU/view?usp=drive_link
B. PENGUKURAN KINERJA												
1.	Data kinerja belum relevan	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja	SOP belum tersedia	Penyusunan SOP data kinerja	SOP tersedia	1 Dokumen	Penyusunan SOP	Juli 2026	Kasubbag Umum	Belum selesai	SOP Pengukuran	https://drive.google.com/file/d/1uDINJ-ClnSrE6j9CjMfm-r73XRzpIKb/view?usp=drive_link
2.	Unit kerja belum peduli terhadap hasil pengukuran	Evaluasi capaian per triwulan kepada pimpinan	Evaluasi belum rutin	Pelaksanaan evaluasi triwulan	Jumlah evaluasi	4 kali	Rapat evaluasi capaian	Triwulan 2026	Kepala Bidang	Proses	Laporan monitoring	https://drive.google.com/file/d/16R30bVmUrWabWQDemlL3g94Rtl4YRSU/view?usp=drive_link

3.	Pegawai belum peduli terhadap capaian pribadi	Monitoring capaian pegawai secara berkala	Monitoring individu belum optimal	Monitoring SKP dan capaian pegawai	Persentase pegawai termonitor	100%	Evaluasi SKP	Semester 2026	Kasubbag Kepegawaian	Berjalan	Rekap SKP	https://drive.google.com/file/d/1NN0ia_y_5U-_Q9KVLOI-y7crjpfKkoYR/view?usp=drive_link
C. PELAPORAN KINERJA												
1.	Dokumen laporan kinerja belum direviu	Mereviu LKJIP oleh pejabat berwenang	Reviu belum terdokumentasi	Pelaksanaan reviu LKJIP	Persentase reviu	100%	Reviu LKJIP	Januari 2027	APIP/Internal	Belum selesai	LKJIP	https://drive.google.com/file/d/1jLjiTXRTX8BkhEj3S4kC_7Y5rwGXSlwr/view?usp=sharing
2.	LKJIP belum memuat efisiensi penggunaan sumber daya	Menyusun LKJIP sesuai PermenPANRB 53/2014	Format LKJIP masih sederhana	Penyempurnaan LKJIP	Kualitas LKJIP	Baik	Penyusunan LKJIP	Januari 2027	Tim LKJIP	Proses	Draft LKJIP	https://drive.google.com/file/d/1jLjiTXRTX8BkhEj3S4kC_7Y5rwGXSlwr/view?usp=drive_link
3.	Informasi laporan belum dimanfaatkan pimpinan	Membahas laporan kinerja dalam forum pimpinan	Belum rutin dibahas	Forum pembahasan laporan	Jumlah forum	4 kali	Rapat pimpinan	Triwulan 2026	Kepala Badan	Berjalan	Notulen rapat	https://drive.google.com/file/d/1YuNI6jg6yG3xdbH3EBgrY85RrdrN9Gg3/view?usp=drive_link
D. EVALUASI KINERJA												
1.	Evaluasi internal belum dilakukan seluruh bidang	Melaksanakan evaluasi internal berkala	Evaluasi baru sebagian bidang	Evaluasi seluruh bidang	Persentase bidang dievaluasi	100%	Evaluasi internal SAKIP	Semester 2026	Inspektorat/Internal	Belum selesai	LHE SAKIP	https://drive.google.com/file/d/1NXQfkGx1PzFuWMhtPO2G0YsE9PfckKUD/view?usp=drive_link
2.	Rekomendasi hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP	Sebagian rekomendasi belum selesai	Penyusunan matriks tindak lanjut	Persentase TL selesai	90%	Monitoring tindak lanjut	Juli–Des 2026	Sekretaris Badan	Proses	Matriks TL	https://drive.google.com/file/d/1ZmuiFo9abUwDao9yc88hs49PZPYG7SSO/view?usp=drive_link
3.	Hasil evaluasi internal belum dimanfaatkan	Memanfaatkan hasil evaluasi untuk efektivitas kinerja	Belum optimal	Integrasi hasil evaluasi dalam perencanaan	Persentase rekomendasi digunakan	100%	Penyusunan rencana aksi	Agustus 2026	Kepala Badan	Berjalan	Dokumen RTL	https://drive.google.com/file/d/1L0dEgujhktLefe8yl3j2T2-NR9irwboC/view?usp=drive_link

**PERUBAHAN SIGNIFIKAN
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2026**

A. KOMPONEN SAKIP

1. Perencanaan Kinerja

- Perencanaan kinerja telah dilakukan melalui penyelarasan sasaran strategis dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Perangkat Daerah.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah direviu dan disempurnakan agar memenuhi prinsip SMART.
- Cascading kinerja telah disusun mulai dari level pimpinan hingga pelaksana.
- Pohon kinerja telah disempurnakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan yang berorientasi hasil.
- Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan program dan penganggaran.

2. Pengukuran Kinerja

- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi triwulanan.
- Pengumpulan data kinerja mulai dilaksanakan secara lebih sistematis melalui penyusunan SOP pengukuran kinerja.
- Hasil pengukuran kinerja telah digunakan sebagai bahan evaluasi capaian program dan kegiatan.
- Monitoring capaian individu pegawai telah dilakukan melalui evaluasi SKP.
- Pengukuran kinerja mulai diarahkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3. Pelaporan Kinerja

- Penyusunan LKjIP telah mengalami penyempurnaan terutama pada penyajian capaian indikator kinerja dan analisis pencapaian sasaran strategis.
- Laporan kinerja telah memuat informasi mengenai keberhasilan, hambatan, dan langkah tindak lanjut perbaikan kinerja.
- Reviu terhadap dokumen pelaporan kinerja mulai dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas laporan.
- Informasi dalam laporan kinerja mulai dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan pimpinan.
- Penyusunan laporan kinerja dilakukan lebih akuntabel dan berorientasi hasil.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Evaluasi internal implementasi SAKIP mulai dilaksanakan secara berkala pada seluruh bidang/unit kerja.
- Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi telah dilakukan melalui penyusunan matriks tindak lanjut rekomendasi.
- Hasil evaluasi internal mulai dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan pengukuran kinerja.

- Koordinasi antarbidang dalam implementasi SAKIP semakin ditingkatkan.
- Evaluasi internal telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

B. UPAYA STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN

1. Melaksanakan reviu dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
3. Menyusun SOP pengukuran dan pelaporan kinerja.
4. Melaksanakan koordinasi dan asistensi implementasi SAKIP.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan dan pelaporan kinerja.
6. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM.
7. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP.

C. UPAYA LAINNYA

1. Melakukan penyesuaian strategi pencapaian target kinerja sesuai prioritas pembangunan daerah.
2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran pada program dan kegiatan prioritas.
3. Meningkatkan koordinasi lintas bidang dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.
4. Mendorong budaya kerja berorientasi hasil dan peningkatan akuntabilitas kinerja pegawai.
5. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja individu dan organisasi.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan program kerja.

HUBUNGAN KEBERHASILAN SASARAN STRATEGIS
DENGAN CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH
(KHUSUS PEMERINTAH DAERAH)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kebhasilan sasaran "Meningkatnya efektivitas koordinasi dan komunikasi lintas lembaga pusat-daerah" mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah lainnya. Melalui fasilitasi koordinasi dan komunikasi yang efektif, berbagai program pembangunan daerah dapat terlaksana lebih optimal sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

B. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Peningkatan nilai IPM menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan koordinasi pembangunan lintas sektor.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan mendukung pencapaian tersebut melalui pelayanan administrasi pemerintahan, fasilitasi koordinasi antarlembaga, dan dukungan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah secara efektif dan efisien.

C. TINGKAT KEMISKINAN

Persentase tingkat kemiskinan menunjukkan tren yang terkendali melalui pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah didukung oleh penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas koordinasi antarinstansi yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah.

D. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan upaya dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan investasi, pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan pemerintahan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah dan pelayanan publik.

E. KETIMPANGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya menjaga stabilitas ketimpangan pendapatan melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan akses pelayanan masyarakat.

Kontribusi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dilakukan melalui penguatan koordinasi antarinstansi dan dukungan administrasi pemerintahan sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

F. TINGKAT INFLASI DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus menjaga stabilitas inflasi daerah melalui pengendalian harga dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah melalui fasilitasi koordinasi antarinstansi dan dukungan kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sehingga stabilitas pelayanan pemerintahan tetap terjaga.

Keterangan

Nilai indikator makro pembangunan daerah disesuaikan dengan data resmi BPS, RKPD, LKPJ atau dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.